

Apakah itu Investment Project Ready to Order (IPRO)?

What Is Investment Project Ready To Over (IPRO)?



Idha Susanti, S.Pt, M.M

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sampai saat ini realisasi investasi bidang peternakan belum mencapai 1% jika dibandingkan dengan total investasi di Indonesia. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di bidang peternakan.

■ Apa pentingnya investasi bidang peternakan?

Dalam pembangunan bidang peternakan dapat menggunakan pembiayaan yang bersumber dari:

1. *Private Finance Initiative/PFI (modern), dimana sumber pembiayaan bersumber dari:*

a. Swasta /public

Modal atau sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan yang

Until now, the realization of investment in the livestock sector has not reached 1% compared to total investment in Indonesia. For this reason, various efforts are needed to attract investors to invest their capital in the livestock sector.

■ *What is the importance of investing in the livestock sector?*

In the development of the livestock sector, financing can be used from sources

1. *Private Finance Initiative/PFI (modern) where the source of financing comes from:*

a. *Private / public*

Capital or sources of funds that can be utilized for livestock businesses come from





berasal dari swasta (investor) yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada bidang peternakan. Untuk pemanfaatan sumber dana ini di atur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

b. Kerja sama

Modal atau sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan yang berasal dari hasil kerjasama (joint venture), baik dengan investor maupun pemerintahan atau Lembaga yang pemanfaatannya di atur melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kedua jenis dana PFI tersebut dapat di manfaatkan untuk pembangunan peternakan mulai dari usaha hulu sampai ke hilir, akan tetapi dalam pemanfaatannya perlu fasilitasi untuk menarik karena dana ini dapat dimanfaatkan untuk semua bidang usaha. Bentuk dana ini bukan APBN/APBD sehingga perlu promosi dan menyakinkan bahwa bidang peternakan memerlukan dana PFI dan jaminan aman pemanfaatannya karena perlu adanya pengembalian modal sebagai keuntungan usaha. Perlu adanya informasi yang detail terkait potensi dan peluang usaha peternakan sehingga para pemilik modal memiliki keyakinan untuk menanamkan modalnya. Sangat berbeda dengan dana Non PFI yang membuat target kemanfaatan tetapi tidak di

private investors who are interested in investing their capital in the livestock sector. The utilization of this funding source is regulated in Presidential Decree Number 16 of 2012 concerning the General Investment Plan (GIP).

b. Cooperation

Capital or sources of funds that can be utilized for livestock businesses come from joint ventures, either with investors or governments or institutions, the use of which is regulated through Presidential Decree Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Providing Infrastructure.

Both types of PFI funds can be used for livestock development from upstream to downstream businesses, but their use requires facilitation to attract them because these funds can be used for all business fields. This form of funding is not state budget so it needs to be promoted and ensured that the livestock sector requires PFI funds and a guarantee of safe use because there needs to be a return on capital as business profits. There needs to be detailed information regarding the potential and opportunities of livestock businesses so that capital owners have the confidence to invest their capital. This is very different from non-PFI funds which set a benefit



targetkan untuk pengembalian atau keuntungan.

2. Non PFI (traditional) dimana sumber pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD.

Saat ini pemerintah dan pemerintah daerah sebagian besar masih konsentrasi dengan pemanfaatan dana non PFI dalam pelaksanaan pembangunan, akan tetapi disadari bersama bahwa dana tersebut sangat terbatas jumlahnya. Tidak terkecuali bidang peternakan, saat ini masih sangat minim fasilitasi pemanfaatan sumber dana PFI.

Pembangunan bidang peternakan untuk berbagai komoditi mulai dari usaha hulu sampai dengan usaha hilir sangat memerlukan sumber dana PFI. Dalam proses pemanfaatan sumber dana tersebut baik swasta/public maupun kerjasama diperlukan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah termasuk Kementerian Pertanian. Jadi dalam mendukung kegiatan produksi yang menjadi tugas pokok Kementerian Pertanian sangat perlu adanya kegiatan fasilitasi investasi untuk mensupport pembiayaan non PFI yang jumlahnya terbatas.

Jika dilihat dari sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung terealisasinya target dari tugas

target but are not targeted for returns or profits.

2. Non PFI (traditional) where the source of financing comes from the state budget and regional budget.

Currently, the government and regional governments are still largely concentrating on the use of non-PFI funds in implementing development, but we are all aware that these funds are very limited in amount. The livestock sector is no exception, currently there is still very little facilitation for the use of PFI funding sources.

Development of the livestock sector for various commodities ranging from upstream to downstream businesses really requires PFI funding sources. In the process of utilizing these funding sources, both private/public and collaboration, facilitation from the government and regional governments, including the Ministry of Agriculture, is required. So, in supporting production activities which are the main task of the Ministry of Agriculture, it is very necessary to have investment facilitation activities to support non-PFI financing which is limited.

pokok terkait produksi maka investasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan bidang peternakan. Kecuali jika target hanya sebatas hanya menyesuaikan ketersediaan pembiayaan non PFI saja maka investasi belum menjadi hal yang perlu menjadi prioritas. Tentunya pembangunan peternakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan cukup jika terus mengandalkan.

■ Tugas siapa meningkatkan investasi bidang peternakan?

Selama ini kita sering mendengar bahwa investasi adalah tugasnya Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP, sementara Kementerian Teknis dan Dinas Teknis tidak perlu menangani investasi. Setelah kita mengetahui apa pentingnya investasi bagi pembangunan peternakan seharusnya kita akan langsung menganggap investasi merupakan hal yang sangat penting karena ketika memiliki target pembangunan yang cukup untuk semua komoditas baik dari hulu sampai hilir, tidak akan cukup jika mengandalkan pembiayaan non PFI.

Ternyata itu tidak seratus persen benar. Ketika berkomunikasi dengan dua Lembaga tersebut berhasilnya dan tidaknya investasi di bidang tertentu juga dipengaruhi dari kebutuhan bidang tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang di amahkan oleh undang-undang dan arahan presiden bahwa semua mempunyai tugas dan peran dalam meningkatkan investasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

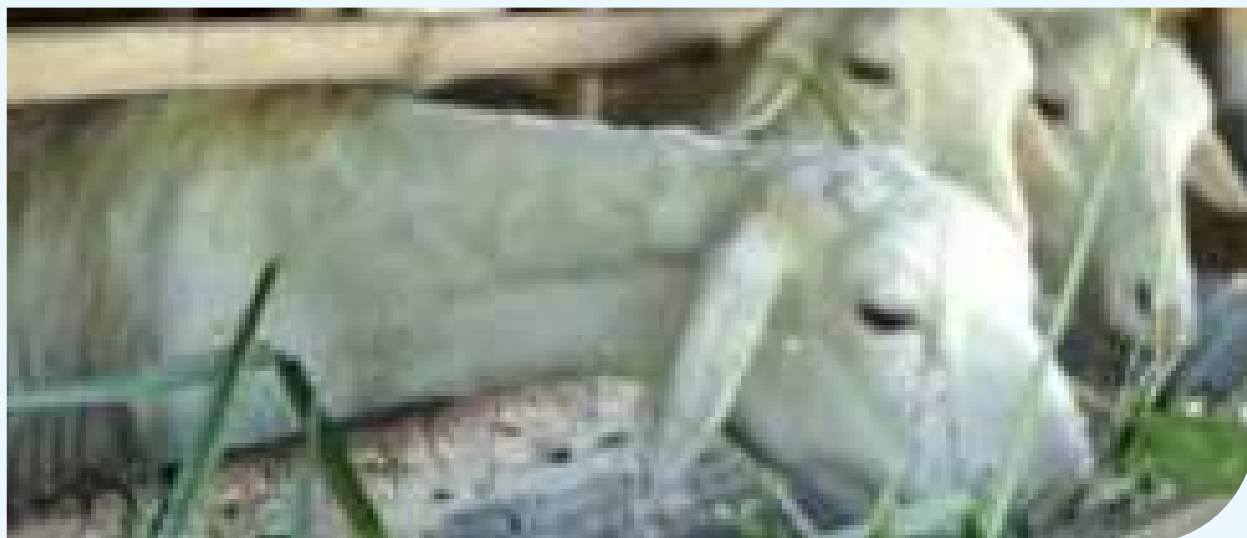
Kewajiban meningkatkan investasi sesuai dengan

If we look at the sources of financing needed to support the realization of targets for main tasks related to production, investment is very important in the development of the livestock sector. Unless the target is only limited to adjusting the availability of non-PFI financing, investment is not yet something that needs to be a priority. Of course, developing livestock to meet food needs will not be enough if we continue to rely on non-PFI financing.

■ Whose job is it to increase investment in the livestock sector?

So far, we often hear that investment is the task of the Ministry of Investment/BKPM and DPMPTSP, while the Technical Ministry and Technical Services do not need to handle investment. Once we know the importance of investment for livestock development, we should immediately consider investment to be very important because if we have sufficient development targets for all commodities from upstream to downstream, it will not be enough to rely on non-PFI financing.

It turns out that's not one hundred percent true. When communicating with these two institutions, the success or failure of investment in a particular field is also influenced by the needs of that field. This is in line with what is mandated by law and presidential directives that everyone has a duty and role in increasing investment in accordance with their respective fields.



AGUSTUS

arahan presiden menjadi tugas baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sesuai dengan amanah UUCK dan Kebijakan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Amanah dalam UUCK ada tiga hal yaitu: 1) kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM; 2) peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha; 3) investasi pemerintah pusat dan percepatan project strategis nasional dan daerah.

Kemudahan PSN pemerintah pusat dan pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat bertanggungjawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi PSN dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Proyek dan/atau program dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, dan/atau BU yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lima arahan utama presiden sebagai strategi pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 terkait dengan pertanian adalah pembangunan infrastruktur dengan sub infrastruktur ekonomi pertanian, perkebunan, Kawasan/kluster kelautan-perikanan. Rincian kegiatan adalah peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterkan secara adil dan merata.

The obligation to increase investment in accordance with the president's direction is the duty of both the central and regional governments. This is in accordance with the mandate of UUCK and the National Development Policy in implementing National Strategic Projects (NSP). There are three things to trust in UUCK, namely: 1) Ease of protection and empowerment of MSMEs; 2) Improving the investment ecosystem and ease of doing business; 3) Central government investment and acceleration of national and regional strategic projects..

Facilitation of NSP for the central government and regional governments in accordance with their authority based on the NSPK determined by the central government, responsible for providing land and business permits for NSP from the central government, regional government, SOE or ROE. Projects and/or programs implemented by the Central Government, Regional Government, and/or BU have a strategic nature for growth and equitable development in the context of efforts to create jobs and improve community welfare.

The president's five main directions as a strategy for implementing the "Nawacita" mission and achieving the targets of Indonesia's 2045 vision related to agriculture are infrastructure development with agricultural economic sub-infrastructure, plantations, marine-fisheries areas/clusters. The details of the activities





■ Bagaimana cara meningkatkan investasi bidang peternakan?

Salah satu upaya dalam menarik investor agar menanamkan investasinya di bidang peternakan adalah melalui promosi investasi bidang peternakan. Hal ini diperlukan karena untuk memberikan informasi tentang bagaimana potensi dan peluang investasi bidang peternakan agar mengetahui dan memahami bisnis dibidang ini. Menurut bidang promosi investasi Kementerian Investasi saat ini masih sangat minim sekali informasi tentang potensi dan peluang investasi bidang peternakan. Ada beberapa kepala daerah yang mengajukan informasi ini kepada Kementerian Investasi untuk dipromosikan tetapi masih minim yang bidang peternakan. Saat ini yang sudah mengajukan adalah Kabupaten.... dari Provinsi Sumatera Utara untuk komoditas Sapi Perah, Kabupaten Bone dan Gowa dari Provinsi Sulatwesi Selatan untuk komoditas sapi potong. Salah satu bahan untuk pelaksanaan promosi adalah Investment Project Ready To Over (IPRO).

■ Apakah itu IPRO?

Investment Project Ready To Over atau biasa di sebut IPRO adalah sebuah bentuk informasi tentang potensi dan peluang investasi bidang usaha tertentu, komoditas tertentu dan lokasi tertentu, sehingga informasi ini sudah sangat lengkap beserta dukungan daerah dimana lokasi tersebut. Dengan

are that increasing innovation and investment quality is the main capital to encourage higher, sustainable and prosperous economic growth in a fair and equitable manner.

■ How to increase investment in livestock?

One effort to attract investors to invest in the livestock sector is through investment promotion in the livestock sector. This is necessary because it provides information about the potential and investment opportunities in the livestock sector in order to know and understand business in this field. According to the investment promotion sector of the Ministry of Investment, there is currently very little information about the potential and investment opportunities in the livestock sector. There are several regional heads who submitted this information to the Ministry of Investment for promotion but there are still very few in the livestock sector. Currently those who have submitted applications are districts... from North Sumatra Province for dairy cattle commodities, Bone and Gowa districts from South Sulatwesi Province for beef cattle commodities. One of the materials for implementing promotions is Investment Project Ready To Over (IPRO).

■ What is IPRO?

Investment Project Ready To Over or usually called IPRO is a form of information about



IPRO calon investor tinggal melihat kesesuaian target usaha dan lokasi yang ditawarkan, tidak perlu lagi mencari-cari lahan, peluang pasar dan sumber daya, sarana prasarana sebagai pendukung yang sangat penting untuk penanam modal. Didalam IPRO juga diinformasikan status lahan, fungsi lahan, kepemilikan lahan dan keamanan lokasi yang akan digunakan berserta peta dan titik ordinatnya sehingga investor tidak perlu khawatir lagi terkait status lahan yang akan digunakan. Hal ini yang selama ini menjadi kendala paling besar dalam sebuah investasi, dengan adanya IPRO dapat mengurangi kendala investasi.

■ Siapa yang menyusunnya?

Kebutuhan terkait investasi yang paling mengetahui adalah bidang masing-masing, sehingga yang mengetahui kebutuhan akan IPRO adalah yang membidangi usaha tersebut. Kementerian Investasi siap mendukung dan mendampingi dalam penyusunan IPRO dan siap mempromosikan jika IPRO sudah ada. Selama ini masing-masing kepala daerah yang memerlukan investasi di daerahnya mengajukan ke Kementerian Investasi untuk

investment potential and opportunities in certain business fields, certain commodities and certain locations, so that this information is very complete along with regional support where the location is. With IPRO, potential investors just have to look at the suitability of the business target and location offered, no longer need to look for land, market opportunities and resources, infrastructure as a very important support for investors. IPRO also provides information on land status, land function, land ownership and security of the location to be used along with maps and ordinates so that investors no longer need to worry about the status of the land to be used. This has been the biggest obstacle in investment, with IPRO it can reduce investment obstacles.

■ Who compiled it?

The most knowledgeable about investment-related needs are those in their respective fields, so those who know the need for IPRO are those in the business sector. The Ministry of Investment is ready to support and assist in the preparation of IPRO and is ready to promote it if IPRO already exists. So far, each regional head who needs investment

didampingi dalam penyusunan IPRO. Kecuali proyek nasional yang ditetapkan pemerintah menjadi proyek strategis nasional akan disusun oleh Kementerian Investasi atas usulan dari Pemerintah/Bappenas.

Dalam penyusunannya lembaga dapat melakukannya sendiri dengan membentuk tim yang melibatkan para pakar dan pemerintah daerah dimana rencana lokasi investasi akan dilakukan dan pemerintah pembina sector serta melibatkan Kementerian Investasi dan Kementerian ATR/BPN.

Pembangunan peternakan memerlukan dana PFI karena dana non PFI yang sangat terbatas sehingga IPRO merupakan salah satu hal yang harus juga disiapkan disamping menunggu masing-masing kepala daerah mengajukan usulan ke Kementerian Investasi.

■ Bagaimana cara menyusunnya?

IPRO disusun untuk masing-masing komoditi dan masing-masing lokasi, sehingga jika satu komoditi memiliki lokasi yang berbeda juga diperlukan IPRO yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya prioritas proyek atau kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing, demikian juga untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa informasi yang wajib ada dalam IPRO antara lain adalah:

1. Strategis (Pemilihan Proyek/Program) dengan Indikator: a) pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; b) penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Materi Muatan (Kajian Pra-Studi Kelayakan): a) yuridis; b) teknis; c) pasar dan pemasaran; d)

in his region has submitted a request to the Ministry of Investment to be assisted in preparing the IPRO. Except for national projects that are determined by the government to be national strategic projects, they will be prepared by the Ministry of Investment based on proposals from the Government/Bappenas.

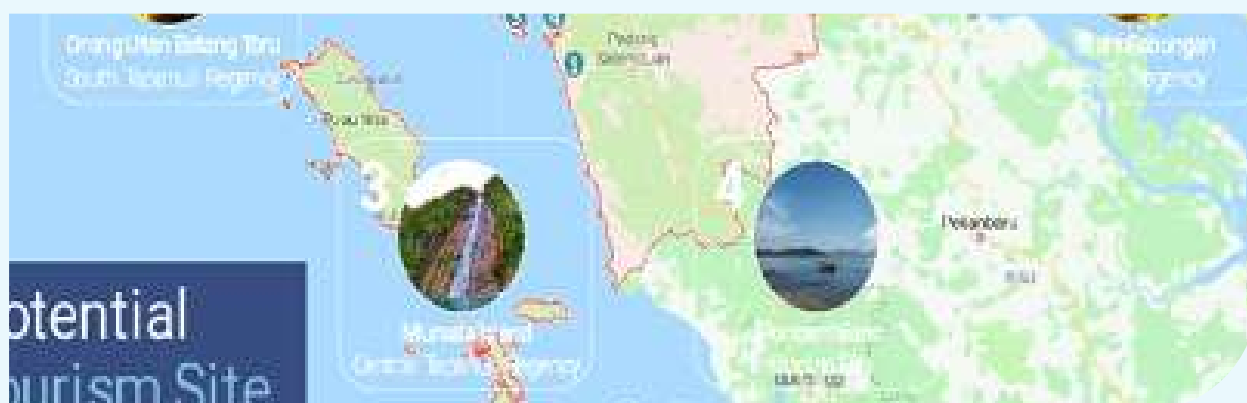
In preparing it, institutions can do it themselves by forming a team involving experts and the regional government where the investment location plan will be carried out and the sector development government and involving the Ministry of Investment and the Ministry of ATR/BPN.

Livestock development requires PFI funds because non-PFI funds are very limited, so IPRO is one of the things that must also be prepared besides waiting for each regional head to submit a proposal to the Ministry of Investment.

■ How to arrange it?

IPRO is prepared for each commodity and each location, so that if one commodity has a different location, a different IPRO is also required. Therefore, it is necessary to prioritize projects or activities determined by each individual, as well as for Animal Husbandry and Animal Health. Some of the information that must be included in IPRO includes:

1. Strategic (Project/Program Selection) with the indicators: a) Growth and Equal Development; b) Job Creation and Increasing Community Welfare





sosial ekonomi; e) keuangan; f) risiko; g) tindak lanjut persoalan.

■ Bagaimana memanfaatkannya?

IPRO dapat dituangkan dalam bentuk buku yang dapat digunakan sebagai promosi baik baik investor local maupun luar. Penyebaran informasi dapat melalui Forum Group Discussion (FGD), temu bisnis (business maching), pameran (promosi) perdagangan atau investasi.

Deputi Promosi Kementerian Investasi akan menggunakan IPRO dan/atau bahan-bahan promosi tersebut untuk bahan promosi di negeri-negara lain yang memiliki potensi investor besar atau dapat melalui kantor-kantor Investasi Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) yang saat ini berada di Singapore, Jepang, Soul, Taibe, Abudhabi, Inggris, Sydney dan New York. Dalam hal diplomasi ekonomi, ada dua instasi utama yaitu perdagangan dan investasi. Hal ini sejalan dengan arahan presiden tentang diperlukannya perwakilan-perwakilan RO di wilayah-wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa Timur, dan Afrika untuk memperoleh informasi pasar-pasar potensial. (is)

2. *Content Material (Pre-Feasibility Study):*
 - a) *Juridical;* b) *Technical;* c) *Markets and Marketing;* d) *Socioeconomic;* e) *Finance;* f) *Risk;* g) *Follow-up Issues*

■ How to make use of it?

IPRO can be written in book form which can be used as a promotion for both local and foreign investors. Information can be disseminated through Forum Group Discussions (FGD), business meetings, trade or investment exhibitions (promotions).

The Promotion Deputy of the Ministry of Investment will use IPRO and/or these promotional materials for promotional materials in other countries that have large investor potential or can be done through the Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) Investment offices which are currently located in Singapore, Japan , Soul, Taipei, Abudhabi, England, Sydney and New York. In terms of economic diplomacy, there are two main institutions, namely trade and investment. This is in line with the president's direction regarding the need for RO representatives in the regions of Central Asia, South Asia, Eastern Europe and Africa to obtain information on potential markets. (is-tr-mua)